

GEOPOLITIK GLOBAL & NASIONALISME SUMBER DAYA DI INDONESIA



Pengantar

Indonesia baru saja selesai melakukan Pemilu di tahun 2024, dan kembali mengantarkan beberapa Partai Politik konservatif ke panggung kekuasaan di legislatif, seperti PDI-P, Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, dan PAN. Bahkan, pertarungan perebutan kekuasaan eksekutif, yang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hanya sekadar mengganti tokoh sebagai aktor utama pelaksana kebijakan ekonomi neoliberal di Indonesia. Perseteruan politik yang disajikan kepada rakyat hanya menggambarkan kompetisi perebutan kursi kekuasaan oleh para elit borjuasi nasional dalam rangka menjaga “kepentingannya” tanpa ada perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi politiknya, terlepas dari siapapun pemenang Pemilu Presiden dan Legislatifnya. Contohnya adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja yang masih tetap di jalurnya.

Disusun oleh:

Muslim Silaen (KPR)

Salsabila Putri Noor Aziziah (Puanifesto)

Olisias Gultom (Hints)

Rachmi Hertanti (Transnational Institute)

Tulisan ini merupakan ringkasan dari paparan narasumber, Irwansyah (Akademisi UI) dan Olisias Gultom (Hints) dari diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) pada 4 April 2024 dan dilengkapi dengan beberapa referensi yang terkait.

Sistem politik yang menjalankan tatanan demokrasi liberal yang prosedural, maka jalannya demokrasi tidak akan berubah dan hanya menjadi legitimasi atas kekuasaan elit semata dalam memuluskan agenda neoliberal yang didesak oleh kapitalisme internasional. Misalnya, pilihan Prabowo-Gibran untuk tetap melanjutkan kebijakan politik-ekonomi rezim Jokowi perlu juga dibaca dalam lensa yang integral terkait analisis ekonomi-politik global hari ini. Tentunya, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik global yang sedang terjadi hari ini yang akan berdampak terhadap model kebijakan politik dan ekonomi

pemerintahan Indonesia yang baru dalam 5 (lima) tahun mendatang. Agenda pembangunan ekonomi politik Indonesia akan menghadapi tantangan besar khususnya terkait dengan tren bangkitnya agenda nasionalisme, tidak hanya di beberapa negara barat tetapi juga di negara selatan, dalam merespon kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang didorong oleh kompetisi perebutan sumber-sumber daya ekonomi strategis dalam upaya merebut dominasi global atas situasi dunia yang multipolar hari ini.

Tarik-menarik kekuatan antara AS dengan China telah menjadi satu pusaran yang memberikan implikasi besar terhadap penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang masih bergantung pada modal asing, dan pada akhirnya menentukan arah diplomasi ekonomi-politik Indonesia di level internasional. Misalnya, pertarungan perebutan penguasaan atas akses energi dan mineral penting yang dibutuhkan untuk transisi ekonomi digital dan hijau menjadi kunci dari menguatnya tren proteksionisme di dunia. Transisi energi hijau telah mendorong pencarian dan penguasaan sumber sumber energi hijau, termasuk kompetisi penggunaan teknologi baru.

Hal ini berbeda dengan energi fosil yang telah lebih 'mature'. Pasca krisis tahun 2008, di AS dan Kawasan Uni Eropa kerap mengambil pilihan untuk lebih mengarah pada model politik yang lebih nasionalistik, melalui penerapan beberapa kebijakan anti-perdagangan bebas dan proteksionis dalam agenda ekonominya sebagai upaya melancarkan penghadangan ekspansi China di beberapa kawasan dunia. Bahkan, menguatnya peran RRC dalam penyediaan vaksin, menjadi alternatif baru dan menjadi kompetisi atas dominasi negara negara 'barat' selama ini



khususnya pada saat merebaknya Pandemi Covid19. Situasi ini sangat berdampak besar terhadap negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada negara-negara industri besar, seperti AS, Eropa, China, dan Rusia. Krisis yang terjadi pada saat Covid-19 telah memperlihatkan sangat rentannya ketergantungan negara berkembang, khususnya Indonesia, yang memperdalam buruknya kondisi perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pasca Covid-19 beberapa negara berkembang kemudian mengambil posisi yang cukup sama dengan negara industri maju dengan beberapa pendekatan yang nasionalis, dan menerapkan kebijakan proteksionis dalam agenda pembangunan ekonominya untuk mengamankan kepentingan nasional yang ter-disrupsi oleh situasi geopolitik dan geoekonomi global. Dalam merespon situasi ini, maka penting bagi gerakan rakyat di Indonesia untuk kembali mempertajam analisisnya dalam rangka menyusun agenda perjuangan kolektif mendorong perubahan yang sejati untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak.

Pergeseran Hegemoni Global & Standar Baru Aturan Global

Mengamati perkembangan geopolitik dan geoekonomi dalam 10 tahun terakhir ini, tak dapat dipungkiri dunia kerap mengalami kebangkitan nasionalisme. Pasca krisis tahun 2008, telah menjadi titik kulminasi krisis kapitalisme global yang pemulihannya tidak lagi dapat dijawab dengan cara klasik yang biasa ditempuh. Kekuatan globalisasi telah bergeser yang dipengaruhi dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi dan industri di Asia, dan pertumbuhan China yang pesat telah menjadi faktor terjadinya pergeseran pola globalisasi akibat perubahan model rantai nilai global yang mendorong kegiatan global value chain semakin ter-regional dibandingkan global¹.

Pergeseran ini terjadi akibat perubahan hegemoni global dari dunia yang unipolar menuju multipolar. Munculnya kekuatan China telah menjadi pesaing kuat hegemoni AS di dunia. Situasi ini telah mendorong munculnya kekuatan pemerintahan “Nasionalisme populis” sayap kanan di negara industri barat seperti AS dan Eropa, yang berbalik menentang agenda globalisasi dan memilih kebijakan nasionalis yang proteksionis sebagai strategi untuk menolak ekspansi dominasi ekonomi China di dunia.

Saat ini ketidakpercayaan terhadap globalisasi paling keras diteriakan oleh penganut fundamentalis kapitalisme itu sendiri yang

pada akhirnya berdampak terhadap runtuhnya legitimasi terhadap sistem tersebut².

Tak pelak berbagai kebijakan proteksionisme mulai dilancarkan para pemimpin sayap kanan seperti Donald Trump di Amerika Serikat (AS) dan Boris Jhonson dengan brexit-nya di Inggris saat itu. Menolak multilateralisme dan mendorong reformasi lembaga multilateral, serta re-negosiasi kerjasama ekonomi pada level bilateral dan regional menjadi pilihan utamanya. Perang dagang, khususnya yang ditabuhkan oleh AS terhadap China, telah menyedot keprihatinan global yang berdampak signifikan terhadap arah perubahan tatanan globalisasi hari ini³. Bahkan, dalam perkembangan hari ini, kekuatan sayap kanan di Eropa dan perebutan kursi kekuasaan di AS akan kembali memperkuat kelompok kanan. Dalam konteks ini, tentu nasionalisme yang dibangun oleh negara barat merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan hegemoni ekonomi neo-liberal negara-negara kaya atau imperialis yang tertarik untuk menduduki pasar domestik negara-negara berkembang dengan perusahaan multinasional mereka⁴.

Namun, resesi global yang berkepanjangan tampaknya tidak dapat dihindari dan membuat mayoritas negara-negara di selatan semakin miskin dengan ketidaksetaraan multidimensi yang semakin besar, ruang fiskal yang lebih kecil, dan lebih banyak utang⁵. Pendalaman krisis ekonomi global akibat perang dagang AS-China dan Pandemic Covid19 telah berdampak

1. Rachmi Hertantiadmin-igj, 'Perubahan Tatanan Globalisasi: "Pengaturan Baru Standar Perdagangan Global"', *Indonesia for Global Justice (blog)*, 30 November 2020, <https://igj.or.id/2020/11/30/perubahan-tatanan-globalisasi-pengaturan-baru-standar-perdagangan-global/>.

2. *Transnational Institute's Working Report, "Understanding and Confronting Authoritarianism", Pg.6-7, Amsterdam 2017*

3. Rachmi Hertanti, *ibid.*

4. Luiz Bresser-Pereira, 'Economic Nationalism and Developmentalism', *Fiscaoconomia 2*, no. 1 (28 February 2018): 1-27, <https://doi.org/10.25295/fsecon.2018.s1.001>.

terhadap disrupsi rantai pasok global dan memberikan dampak besar terhadap negara-negara berkembang di dunia. Situasi inilah yang kemudian mendorong menguatnya tren nasionalisme sumber daya di negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan nasionalnya ditengah kebutuhan penyelamatan manusia secara khusus dan kelanjutan ekonomi secara umum. Dengan demikian, krisis COVID-19 dapat dianggap sebagai tanda titik kritis yang mendorong banyak negara dan bisnis untuk merombak rantai pasokan mereka dan akibatnya berinvestasi dalam skema produksi dan distribusi yang lebih tangguh dan sering kali lebih bersifat lokal, dengan mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain⁶.

Merujuk pada situasi pasca Covid19, agenda pengamanan rantai pasok terhadap komoditas strategis industri menjadi pertarungan penting negara-negara di dunia khususnya di tengah tensi geopolitik yang membagi dunia ke dalam dua kutub kekuatan global, yakni AS dan China. Saat ini, kerjasama internasional lebih didasarkan pada kekuatan mitra yang berpikiran sama (like-minded partners) yang menjadikan ekonomi sebagai senjata politik melalui Friend-shoring yang memindahkan produksi ke lokasi-lokasi asing yang bersahabat atau bersekutu secara diplomatik⁷.

Ini bisa terlihat dari beberapa agenda keamanan internasional sangat mempengaruhi negara-negara berkembang dalam membangun

mitra kerjasama ekonomi internasionalnya. Misalnya saja di kawasan Asia Pasifik, menguatnya ketegangan geopolitik AS-China telah mendorong kompetisi ketat kerjasama di kawasan antara inisiatif AS melalui blok OECD dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dengan inisiatif China melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan blok negara selatan seperti BRICS. Termasuk, untuk memenangi pertarungan, maka tatanan standar global baru harus di-setting ulang.

Perkembangan tren global yang mendorong agenda transisi energi dan digitalisasi telah memunculkan pertarungan baru untuk menghadirkan standar aturan baru global yang dikemas dengan isu berkelanjutan dan HAM, yang tujuannya sebatas hanya untuk menghadang ekspansi dan dominasi pasar bagi pesaing hegemoni imperialis.

Dalam konteks ini, negara-negara di selatan kembali menghadapi tekanan global besar dan terjebak di antara jaringan ketegangan politik global dan keharusan secara politik untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Sebagai responnya, fenomena nasionalisme sumber daya telah menjadi strategi diplomasi yang dipilih negara berkembang, seperti di Indonesia, Afrika, dan Latin Amerika, bahkan tanpa harus memilih pada dua kubu, dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya sendiri menghadapi persoalan krisis multidimensi di dunia.

5. *Development Matters*, 'COVID-19: A Game Changer for the Global South and International Co-Operation?', *Development Matters*, 2 September 2020, <https://oecd-development-matters.org/2020/09/02/covid-19-a-game-changer-for-the-global-south-and-international-co-operation/>.

6. Prawita Meidi Handayani, 'Nationalism Over Globalization amidst COVID-19 Pandemic and Its Impact on Indonesia's Food Security', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 2 (5 December 2020): 143–61, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1751>.

7. 'US and European Strategies for Resilient Supply Chains', *Chatham House – International Affairs Think Tank*, 14 September 2021, <https://www.chathamhouse.org/2021/09/us-and-european-strategies-resilient-supply-chains>.



Nasionalisme Sumber Daya di Negara Selatan

Nasionalisme sumber daya adalah sebuah istilah yang menggambarkan cara di mana negara, melalui aktor-aktor pemerintah, mencoba untuk mengekstraksi lebih banyak nilai dari dan menggunakan lebih banyak kepemilikan atas sumber daya alam yang mereka miliki⁸. Hal ini sebagai reaksi untuk memutus pola ekstraktif historis kolonial di negara berkembang yang menimbulkan ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas primer dengan sedikit sekali pembangunan ekonomi yang dapat ditunjukkan kepada mereka atau

dikenal dengan “kutukan sumber daya”. Ekstraktivisme telah menjadi mekanisme perampasan dan penindasan kolonial dan neokolonial atas bahan-bahan mentah yang penting bagi perkembangan industri dan kemakmuran negara-negara di Utara⁹.

Dari pengalaman di Amerika Latin, upaya untuk memutus ketergantungan ekonomi dari pola ekstraktif kolonial dikenal dengan “gerakan dependencia”. Gerakan ini lekat dengan agenda nasionalisme ekonomi dalam rangka memutus posisi subordinasi yang melayani kapitalisme global. Dalam perjalanannya, gerakan ini terbagi menjadi dua kelompok yang memiliki pendekatan berbeda dalam mempraktekan nasionalisme ekonomi, yaitu: **Pertama**, kelompok radikal, dipopulerkan oleh Andre Gunder Frank dan Dos Santos, mengambil pendekatan nasionalisme ekonomi dengan gerakan pembebasan anti-kolonialisme progresif; dan, **Kedua**, kelompok reformis, dipopulerkan on Fernando Cardoso, mengambil pendekatan nasionalisme ekonomi dengan agenda developmentalisme¹⁰.

Dalam konteks nasionalisme ekonomi dalam kerangka developmentalisme, kelompok reformis dependensia menilai bahwa pola ekonomi kolonial telah menyebabkan keterbelakangan ekonomi di negara pinggiran dan diperlukan kedaulatan negara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi¹¹. Developmentalisme dan nasionalisme ekonomi itu sendiri sering diidentikkan dengan

8. Eve Warburton, '6. Nationalism, Developmentalism and Politics in Indonesia's Mining Sector: Globalisation, Nationalism and Sovereignty', in *Indonesia in the New World*, 2018, 90–108, <https://doi.org/10.1355/9789814818230-011>.

9. Alberto Costa, "Extractivism and Neoextractivism: Two Sides of the same curse", in *Beyond Development Alternative Visions from Latin America*, Edited by M.Lang and D.Mokrani, Rosa Luxemburg Foundation and Transnational Institute, August 2013, Pg.61-83

10. Rex Mckenzie on Ushehwedu Kufakurinani et al., *Dialogues on Development Volume 1 - On Dependency*, 2017.

11. Ingrid Harvold Kvangraven, 'Beyond the Stereotype: Restating the Relevance of the Dependency Research Programme', *Development and Change* 52 (4 June 2020), <https://doi.org/10.1111/dech.12593>.

pembelaan terhadap proteksionisme dan model industrialisasi substitusi impor. Dalam hal ini, peran sentral negara menjadi faktor utama. Inilah yang kemudian nasionalisme ekonomi model ini mengarah pada *developmental state* (negara pembangunan) dimana negara melakukan intervensi moderat dalam perekonomian, mengadopsi pembangunan ekonomi sebagai prioritas dan berinvestasi di sektor ekonomi yang tidak kompetitif dan menyerahkan koordinasi sektor kompetitif kepada perangkat pasar, serta yang menganut kebijakan industri yang menjaga keseimbangan harga makroekonomi, terutama nilai tukar, yang, berkat kebijakan nilai tukar, membuat perusahaan-perusahaan manufaktur yang kompeten di negara tersebut menjadi kompetitif⁽¹²⁾.

Dalam prakteknya, pendekatan nasionalisme ekonomi yang mengarah pada negara pembangunan kerap diusung oleh elit politik borjuasi yang membentuk kelas nasional antara kapitalis dan tekno-birokrat dalam mempertahankan rezim kebijakan ekonomi liberalnya. Pada akhirnya hal ini menghilangkan makna ideologi bangsa, dan membuat kedaulatan nasional menjadi konsep yang tidak berarti dan mendiskreditkan nasionalisme ekonomi negara-negara pinggir⁽¹³⁾.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan nasionalisme sumber daya yang dipraktekan oleh Pemerintah Indonesia, baik di bawah Rezim Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Rezim Prabowo, nampaknya menunjukkan

model kebijakan nasionalisme ekonomi yang mengarah pada *developmental state*. Agenda pembangunan industri hilir, khususnya di sektor tambang mineral, yang diklaim pemerintah sebagai perwujudan kedaulatan ekonomi Indonesia dari pelaksanaan mandate konstitusi pada akhirnya hanya mempertahankan model subordinasi ketergantungan Indonesia pada mekanisme pasar global.

Ditilik dari analisa Eve Warburton⁽¹⁴⁾, ia melihat bahwa kebijakan nasionalisme sumber daya di Indonesia lebih diperkuat dengan alasan adanya boom komoditas yang dimanfaatkan sebagai peluang politik oleh elit-elit nasional dan lokal bersamaan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2009, termasuk mandate pelaksanaan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. Sehingga bagi elit lokal, penciptaan kekayaan dari sektor sumber daya alam sangat besar dan cepat, serta lebih kuat untuk mereproduksi kekuasaannya. Lebih lanjut Eve menjelaskan bahwa semangat nasionalisasi dalam UU Minerba lebih didasarkan pada negosiasi oleh para aktor dari partai politik, bisnis, birokrasi, dan legislative, seperti yang ditekankan oleh Warburton (2018⁽¹⁵⁾)

“Perusahaan-perusahaan domestik terbesar yang mendominasi sektor ini mengumpulkan kekayaan mereka dengan mengakuisisi saham dalam operasi asing. Divestasi asing merupakan peluang untuk ekspansi lebih lanjut dari kepentingan swasta lokal. Ada lebih banyak uang yang dapat dihasilkan selama booming, yang memotivasi

12. Bresser-Pereira, 'Economic Nationalism and Developmentalism'.

13. Bresser-Pereira.

14. Eve Warburton, 'Our Resources, Our Rules: A Political Economy of Resource Nationalism in Indonesia', 2018, <https://doi.org/10.25911/5d67b49938e3a>.

15. Warburton.

pejabat negara (yang sering kali korup) dan kelompok bisnis yang terhubung secara politis untuk mencari akses yang lebih besar ke sumber daya alam melalui intervensi negara yang lebih besar.”

Namun, dalam konteks ini, agenda nasionalisme ekonomi elit politik lokal di Indonesia juga tidak begitu kuat dalam membangun agendanya sendiri. Hal ini karena mereka masih bergantung dengan pembiayaan, pasar, dan teknologi dari kapitalisme global. Ini juga yang akhirnya pilihan politik nasionalnya tetap akan menjadi kepanjang-tangan kepentingan kapitalisme global. Misalnya saja, sebelum Pemilu 2024, Jokowi melakukan lobby ekonomi dan politik yang kuat dengan AS dan China untuk melindungi proyek pembangunan nasional para elit politik lokal di masa depan dan di bawah Presiden Indonesia yang baru, agar tetap aman di tengah ketegangan geopolitik di Kawasan Laut China Selatan.

Inilah yang mendasari kenapa kelompok dependensia radikal tidak memilih pendekatan nasionalisme ekonomi dengan model *developmental state*. Hal ini karena, konsep tersebut bukanlah bagian dari agenda gerakan pembebasan nasional dari kolonialisme yang hanya Kembali menyerahkan kekuasaan kepada kaum borjuis dan oligarki yang masih menjadi bagian dari subordinasi kapitalisme global. Apalagi mengingat, pasca selesainya perang dunia kedua yang mendorong ekspansi ekonomi neo-liberal melalui Washington Consensus telah menjadi alat bagi negara utara

(central countries) untuk mempertahankan hegemoni imperialisnya, dan terus memaksa negara pinggiran untuk beradaptasi dengan agenda tersebut di dalam kerangka kebijakannya dan langkah ini disebut dengan *Unilateraly Adjustment*⁽¹⁶⁾.

Oleh karena itu, bagi kelompok dependensia radikal, keluar dari ketergantungan hanya bisa ditempuh dengan cara-cara yang fundamental. Samir Amin menegaskan memutuskan ketergantungan dari sistem dunia yang neo-liberal hanya bisa dilakukan dengan “delinking” atau pemutusan hubungan sepenuhnya dari kerangka unilateral adjustment. Bahkan, Fidel Castro menyatakan gerakan melawan tatanan ekonomi global harus dilandasi atas kebutuhan untuk ‘menghilangkan hubungan yang tidak setara antara negara-negara kaya dan miskin dan untuk memastikan bahwa negara dunia ketiga memiliki haknya yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasibnya sendiri, bebas dari campur tangan imperialisme dan tindakan eksploitatif dalam ekonomi dan perdagangan internasional⁽¹⁷⁾.

16. 'McKenzie-R-38253-Dependency Theory.Pdf', n.d.

17. Admin, 'Dawn: Marxism and National Liberation', *Tricontinental: Institute for Social Research*, 8 February 2021, <https://thetribune.org/dossier-37-marxism-and-national-liberation/>.



Penutup & Rekomendasi Penguatan Gerakan Indonesia Ke Depan

Berangkat dari pemahaman konsepsi nasionalisme sumber daya yang ada, maka penting bagi gerakan rakyat di Indonesia untuk membangun narasi tandingan terhadap konsepsi nasionalisme ekonomi yang hari ini sedang diterapkan oleh rezim elit penguasa. Dalam membangun narasi tandingan juga harus kembali mengimajinasikan membangun gerakan perlawanan anti-kolonialisme/imperialisme dan kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini dengan terus mempertajam pemahaman dan kesadaran rakyat akan kontradiksi utamanya dengan menemu-kenali perubahan sistem kapitalisme global. Dan, sebagai bagian dari gerakan politik oposisi, perlu membangun kepeloporan alternatif politik rakyat dalam merebut ruang-ruang politik dan demokrasi yang berbasis pada gerakan kelas yang menempatkan negara di tengah intervensi perlawanannya.

Pertentangan gagasan globalisasi dan nasionalisasi ini tentu menghadirkan satu problem besar yang mendunia, acapkali berujung pada kemungkinan ruang berkadar nasional atau global untuk menghadapi satu masalah. Sebut saja seperti soal penyelamatan iklim yang mendorong tata kelola global baru, tetapi melahirkan kecenderungan defensif negara selatan. Platform global dan nasional ini menghasilkan kekuatan regionalisme. Hal ini tidak akan mencukupi karena dibutuhkan solidaritas ekonomi dan politik secara kongkrit antar bangsa tanpa mengedepankan standar bisnis. Agenda solidaritas kaum buruh merupakan satu platform yang memungkinkan solusi-solusi multinasional dapat diatasi secara bersama-sama tanpa menghilangkan kepentingan nasional atas

masalah-masalah global. Solidaritas pekerja ala “internasionalistik” mendapat relevansi untuk bisa kembali dihadirkan dalam mengatasi sumbatan Global Vs Nasional.

Bagi kaum buruh menguatnya agenda nasionalisme adalah pertanda mengecilnya nilai tawar dan kedudukan buruh dalam ekonomi dan politik. Agenda kaum buruh sebagai faktor perubah primer menjadi penting untuk dikembalikan. memperbesar agenda kaum buruh dalam Transisi energi, hilirisasi industri dan upaya nasionalisasi beberapa industri vital penting di rumuskan. Dalam hal ini kita mengantisipasi jika keadaan geopolitik semakin tegang ini akan mendorong kebijakan-kebijakan bersifat pengendalian ketertiban menciptakan wajah represif. Nasionalisme di negara selatan, hanya bisa dicapai untuk kemanfaatan rakyat dan kaum marjinal, jika kaum buruh memiliki ikatan produksi dan politik. Tanpa agenda kaum buruh, Nasionalisme ataupun agenda kebijakan bersifat proteksionis hanya akan menjadi malapetaka bagi rakyat, terkhusus kepada buruh.



KESATUAN PERJUANGAN RAKYAT (KPR) -
PUANIFESTO - SAHITA INSTITUTE (HINTS) - INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) - INDONESIA AIDS
COALITION (IAC) - EKOLOGI MARITIM INDONESIA
(EKOMARIN) - SOLIDARITAS PEREMPUAN - SERIKAT
PETANI INDONESIA (SPI) - KOALISI RAKYAT UNTUK
KEADILAN PERIKANAN (KIARA) - FIAN INDONESIA